



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ISMA'IL HAMID
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 106191

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/40 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/24 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
4. Tanah Seluas 2.100 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/72 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	800.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER CROSS A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. MOBIL, PAJERO SPORT DAKKAR 4X2 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	77.031.600
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.577.031.600



III. HUTANG

Rp. 15.708.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.561.323.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.